

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014). Tujuan dari otonomi daerah yaitu menjadikan daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekayaan atau bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekayaan atau potensi yang terdapat di daerah, seperti objek wisata, hasil bumi, perdagangan, dan budaya. Sumber pendapatan daerah yang diperoleh kemudian dialokasikan dalam belanja daerah yang tertuang pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal).

Menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, perlu kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber (PAD) yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan praturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah (Wempy, 2017: 91). Semakin tinggi pendapatan asli daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal (Yoyo, 2017: 135). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu mengkaji potensi sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perpajakan daerah yang menjadi sumbernya sejak lama. Salah satu unsur utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kekuatan keuangan suatu daerah, maka semakin besar pula peran PAD dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi dan wewenang pemerintah daerah berupa pelaksanaan kekuatan fiksial, setiap daerah harus mampu mengenali potensinya dan menentukan sumber dayanya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memanfaatkan sumber dana terutama melalui PAD guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan pemerintah daerah. Dengan bertambahnya jumlah kewenangan pemerintah yang di transfer ke daerah, maka besar pula kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (Yoyo, 2017:130).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya untuk hal yang lebih bermanfaat.

Tabel I.I

Data Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Tahun 2008-2022

No	Keterangan	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	2008	37.413.000.000	33.498.884.294	90%
		2009	36.440.235.000	34.675.225.785	95%
		2010	38.598.000.000	30.411.000.000	79%
		2011	39.866.000.000	42.119.727.834	106%
		2012	42.913.000.000	18.596.909.106	43%
		2013	42.869.000.000	44.679.789.248	104%
		2014	68.959.000.000	79.344.461.050	115%
		2015	106.821.000.000	98.756.154.905	92%
		2016	104.632.393.216	65.852.957.228	63%
		2017	81.066.358.921	50.116.931.730	62%
		2018	159.534.221.797	156.622.053.791	98%
		2019	124.996.325.806	145.563.548.513	116%
		2020	160.910.882.390	115.934.531.245	72%
		2021	208.003.918.564	102.683.436.657	49%
2022	201.505.379.280	52.568.851.824	26%		
2	Belanja Modal	2008	314.448.000.000	261.829.938.698	83%
		2009	134.396.000.000	212.764.838.612	158%
		2010	179.272.000.000	142.525.000.000	80%
		2011	180.849.000.000	186.489.322.295	103%
		2012	240.107.000.000	25.402.359.860	11%
		2013	348.604.000.000	341.065.201.361	98%
		2014	309.511.000.000	290.864.389.075	94%
		2015	250.582.000.000	223.476.288.576	89%
		2016	232.888.211.760	33.473.184.315	14%
		2017	202.212.944.150	98.989.861.376	49%
		2018	308.659.693.000	328.753.610.069	107%
		2019	312.649.443.157	348.992.623.346	112%
		2020	266.311.906.080	247.547.357.226	93%
		2021	227.628.970.764	263.193.344.805	116%
2022	199.714.644.677	35.917.058.564	18%		

Sumber : <http://djpk.kemenkeu.go.id>,2023

Pemerintah daerah dapat mendistribusikan dana berupa anggaran belanja modal dalam pembentukan modal dan investasi untuk membiayai pembangunan. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan daerah lebih banyak digunakan untuk belanja modal.

Berdasarkan APBD OKU Pada tahun 2008-2022 di atas menunjukkan bahwa Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU tahun 2018 realisasi tertinggi sebesar 156.622.053.791. dan tahun 2021 anggaran tertinggi sebesar 208.003.918.564. Belanja Modal tahun 2019 realisasi tertinggi sebesar 348.992.623.346. dan tahun 2013 anggaran belanja modal tertinggi sebesar 348.604.000.000.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rohardian & Jaeni (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Serta penelitian yang dilakukan Fitri (2021), Menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Fenomena berdasarkan Tabel I.I pendapatan asli daerah pada kabupaten OKU selama enam tahun dari 2008-2022 selalu meningkat. Dikarenakan untuk memenuhi belanja modal, Sehingga Secara teori apabila pendapatan asli daerah meningkat akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah OKU selama Lima belas tahun dari 2008-2022 selalu meningkat, dan secara teori akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, namun pada kabupaten OKU ini PAD meningkat tetapi belanja modal turun.

Fenomena yang berlangsung saat ini adalah menurunnya anggaran PAD Kabupaten OKU tahun 2022 digunakan untuk memenuhi pendapatan lain-lain PAD yang sah, dan menurunnya Belanja Modal pada tahun 2022 digunakan untuk keperluan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan. Besaran PAD dan belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kesimpulannya adalah apabila belanja modal terus mengalami penurunan maka kualitas pelayanan publik akan semakin menurun kualitasnya, padahal masyarakat menginginkan pelayanan publik adalah yang paling utama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2008-2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Kabupaten OKU tahun 2008-2022.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada kabupaten OKU tahun 2008-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia akademik.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh Pendapatan asli Daerah Terhadap Belanja Modal.

b. Bagi pemerintah Kabupaten OKU

Untuk membantu pemerintah kabupaten OKU sebagai acuan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan belanja modal.